

Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara

Samalua Waoma

Program Studi Akuntansi STIE Nias Selatan

samaluawaoma@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah, adakah perbedaan, dan peringkat berapakah kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio, analisis manova dan analisis rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi sangat kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik. Adanya perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Pada rasio ketergantungan keuangan daerah ditempati secara berturut-turut oleh Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan terakhir Kabupaten Nias. Pada kemandirian keuangan daerah posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias selanjutnya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Masyarakat harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai kemampuannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Komparasi, Kinerja Keuangan, dan Daerah

Pendahuluan

Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi dari 34 propinsi yang ada di Indonesia yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota. Beberapa kabupaten yang ada tersebut diantaranya Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias

Barat, dan Kabupaten Nias Utara. Keempat Kabupaten tersebut berada pada satu pulau yang disebut dengan Pulau Nias. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 keempat kabupaten tersebut di atas masuk dalam kategori daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang

wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dengan kriteria a). Perekonomian masyarakat, b). Sumber daya manusia, c). Sarana dan prasarana, d). Kemampuan keuangan daerah, e). Aksesibilitas, dan f). Karakteristik daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2004). Berdasarkan pada kriteria di atas tentunya keempat kabupaten tersebut berada pada kriteria kurang atau mungkin sangat kurang.

Kabupaten Nias merupakan kabupaten tertua (induk) disusul dengan kabupaten pemekaran berturut-turut yaitu Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan gambaran hasil kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik (Ani dan Dwirandra, 2014:483). Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* didalam bidang keuangan artinya daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya (Halim, 2013). Berikut pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan luas wilayah.

Tabel 1

Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, Jumlah Penduduk, IPM dan Luas Wilayah

No	Nama Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengangguran (%)	Kemiskinan (000) jiwa	Jumlah Penduduk (jiwa)	IPM	Luas Wilayah (km ²)
1	Nias	5,43	0,92	24,11	141.403	59,75	1.842,51
2	Nias Selatan	4,46	0,40	57,75	311.319	59,14	1.825,20
3	Nias Barat	4,87	2,96	24,16	80.785	59,03	473,73
4	Nias Utara	5,49	4,02	41,66	135.013	60,23	1.202,78

Sumber: Provinsi Sumut Dalam Angka (2017).

Pada tabel 1 di atas pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih oleh Kabupaten Nias Utara disusul Kabupaten Nias, Kabupaten Nias barat dan terakhir Kabupaten Nias Selatan. Pengangguran terendah di Kabupaten Nias Selatan disusul Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat dan tertinggi di Kabupaten Nias Utara. Jumlah jiwa penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Nias Selatan disusul Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias barat dan terendah di Kabupaten Nias.

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan diukur

secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB perkapita, dan IPM. Berdasarkan tabel 1 di atas jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Nias Selatan disusul Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Dalam hal PDRB tertinggi Kabupaten Nias, diikuti Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Kabupaten Nias Utara menduduki urutan pertama untuk IPM disusul Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan pada kondisi di atas apakah kinerja keuangan juga

mengikuti urutan pada beberapa indikator di atas?.

Salah satu kriteria daerah tertinggal adalah kemampuan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah dalam satu tahun

anggaran pada daerah masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada ketercapaian realisasi APBD setiap tahunnya. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126-127). Berikut ini anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah empat kabupaten yang ada di kepulauan Nias:

Tabel 2
Realisasi APBD Tahun 2012-2016 (dalam ribu rupiah)

No	Nama Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Nias:					
	Anggaran (Rp)	442.130.182	516.664.960	523.374.415	560.862.393	843.699.193
	Realisasi (Rp)	526.349.128	579.405.980	515.836.196	691.021.859	818.455.989
	Realiasi (%)	119,05	112,14	98,56	123,21	97,01
	Rata-rata (%)	109,99				
2	Nias Selatan:					
	Anggaran (Rp)	623.007.839	835.720.278	829.114.321	783.248.764	1.093.581.486
	Realisasi (Rp)	648.206.150	768.231.763	643.149.408	814.895.232	1.008.885.854
	Realiasi (%)	104,05	91,92	77,57	104,04	92,26
	Rata-rata (%)	93,97				
3	Nias Barat:					
	Anggaran (Rp)	343.115.035	368.658.123	397.053.134	440.730.510	599.969.151
	Realisasi (Rp)	362.914.671	415.015.662	373.104.473	465.951.796	534.832.477
	Realiasi (%)	105,77	112,57	93,97	105,72	89,14
	Rata-rata (%)	101,43				
4	Nias Utara:					
	Anggaran (Rp)	331.731.672	483.682.036	495.620.848	537.580.395	761.769.895
	Realisasi (Rp)	426.397.873	496.343.554	490.265.502	599.606.675	679.245.604
	Realiasi (%)	128,54	102,62	98,92	111,54	89,17
	Rata-rata (%)	106,16				

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (diolah)

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan realisasi APBD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Bila diurutkan rata-rata pencapaian realisasi APBD maka Kabupaten Nias berada pada urutan pertama, disusul Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Apakah urutan ini juga

merupakan urutan kinerja keuangan daerahnya?.

Pertanggungjawaban APBD akan terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai

indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013). Kualitas LKPD akan terlihat pada karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami) yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

agar dapat memenuhi tujuannya (Komite Standar Akuntansi pemerintah, 2005:KK-10). Penilaian kinerja LKPD ini di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut ini hasil pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan oleh BPK dalam bentuk opini ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3

Opini BPK Terhadap LKPD Tahun 2012-2016

No	Nama Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nias	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Nias Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
3	Nias Barat	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP
4	Nias Utara	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: BPK RI

Pada tabel di atas ada 2 jenis opini BPK terhadap LKPD yaitu WDP dan TMP (*disclaimer*). Kabupaten Nias mendapatkan WDP lima tahun berturut-turut dan satu tahun TMP, Kabupaten Nias Utara mendapatkan empat tahun WDP dan dua tahun TMP, Kabupaten Nias Barat hanya satu tahun WDP dan lima tahun TMP dan Kabupaten Nias Selatan hanya memperoleh TMP tanpa WDP selama enam tahun. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan daerah yang memperoleh WDP dengan TMP?.

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Adakah perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan

daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

3. Peringkat berapa kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bagaimanakah, adakah perbedaan, dan peringkat berapakah kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tinjauan Literatur

Komparasi merupakan perbandingan antara dua hal yang dianggap berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini menggambarkan terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam kinerja keuangan pada masing-masing daerah yang berbeda yang disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan potensi

pendapatan daerahnya (Hamzah, 2008). Menurut Nazir, (2005:58) Komparasi yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Pendapat lain penelitian komparasi penelitian yang berusaha menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang ide, atau suatu prosedur kerja (Arikunto dalam Sudijono, 2010:274).

Kinerja Keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode (Sucipto, 2007). Menurut Arifin (2004) ada beberapa analisis rasio keuangan di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD yakni tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan desentralisasi fiskal. Hasil analisis APBD merupakan informasi yang penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (1). Memperbaiki kinerja pemerintah, (2). Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3). Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002: 121).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif

statistik. Jenis data adalah data skunder yang berasal dari Laporan realisasi APBD tahun 2010-2016.

Metode analisis data yang digunakan berturut-turut sesuai dengan rumusan masalah adalah analisis rasio, *Analysis of Variance* (anova) dan analisis rata-rata. Untuk menganalisis kinerja keuangan menggunakan analisis rasio yang terdiri dari (Mahmudi, 2010:142):

1. Derajat Desentralisasi =
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$
2. Rasio Ketergantungan Daerah =
$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Propinsi}} \times 100\%$$

Untuk menganalisis perbedaan dan besarnya perbedaan kinerja keuangan setiap kabupaten menggunakan analisis *Multivariate Analysis of Variance* (Manova). Manova merupakan suatu teknik dependensi guna mengukur perbedaan dua atau lebih variabel dependen yang bersifat metrik yang berdasar pada sederet variabel independen bersifat non-metrik (Hair, 2010). Pendapat lainnya Manova adalah metode statistik untuk mengeksplorasi hubungan diantara beberapa variabel independen yang berjenis kategorial (bisa data nominal atau ordinal) dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik (bisa data interval atau rasio dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variabel-variabel dependen antar-anggota grup (Lane, 2016, 114-122). Untuk membandingkan kinerja keuangan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis penelitian yang terdiri dari:

Ho : Tidak ada perbedaan kinerja keuangan.

Ha : Terdapat perbedaan kinerja keuangan.

- b. Menentukan kriteria pengambilan keputusan yaitu: H_0 diterima apabila $Sig \geq 5\%$ dan H_0 ditolak apabila $Sig < 5\%$.

Untuk menganalisis peringkat kinerja keuangan daerah masing-masing kabupaten digunakan rata-rata hitung yaitu menjumlahkan seluruh setiap rasio keuangan dibagi dengan jumlah tahun anggaran dan realiasi APBD setiap kabupaten.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui kinerja keuangan masing-masing kabupaten digunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut hasil analisisnya disajikan pada tabel 4, 5 dan 6:

Tabel 4
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Kab. Nias		Kab. Nias Selatan		Kab. Nias Barat		Kab. Nias Utara	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2010	5.99	Sangat Kurang	3.05	Sangat Kurang	0.74	Sangat Kurang	1.08	Sangat Kurang
2011	4.68	Sangat Kurang	4.69	Sangat Kurang	0.98	Sangat Kurang	2.01	Sangat Kurang
2012	7.28	Sangat Kurang	2.25	Sangat Kurang	1.26	Sangat Kurang	1.94	Sangat Kurang
2013	9.66	Sangat Kurang	1.50	Sangat Kurang	2.21	Sangat Kurang	2.16	Sangat Kurang
2014	12.62	Kurang	1.99	Sangat Kurang	2.76	Sangat Kurang	2.24	Sangat Kurang
2015	10.26	Kurang	1.85	Sangat Kurang	3.11	Sangat Kurang	2.82	Sangat Kurang
2016	10.12	Kurang	1.61	Sangat Kurang	2.94	Sangat Kurang	3.51	Sangat Kurang
Rerata	8.66	Sangat Kurang	2.42	Sangat Kurang	2.00	Sangat Kurang	2.25	Sangat Kurang

Sumber: data diolah (2018)

Pada tabel 4 di atas dapat dilihat penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berada secara umum masih sangat kurang yang artinya bahwa keuangan daerah otonom masih banyak yang berasal dari dana pusat atau provinsi. Hal ini disebabkan oleh minimnya kontribusi PAD setiap daerah otonom terhadap pendapatan yang diterima oleh daerah. Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara berada pada kriteria sangat kurang

sedangkan Kabupaten Nias pada tahun 2014-2016 berada pada kriteria kurang yang artinya pada tahun tersebut agak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membagikan pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang diterima oleh daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Kab. Nias		Kab. Nias Selatan		Kab. Nias Barat		Kab. Nias Utara	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2010	74.24	Sangat Tinggi	85.81	Sangat Tinggi	84.20	Sangat Tinggi	90.89	Sangat Tinggi
2011	82.03	Sangat Tinggi	81.33	Sangat Tinggi	88.86	Sangat Tinggi	85.53	Sangat Tinggi
2012	83.74	Sangat Tinggi	86.85	Sangat Tinggi	94.86	Sangat Tinggi	91.91	Sangat Tinggi
2013	89.61	Sangat Tinggi	88.37	Sangat Tinggi	93.09	Sangat Tinggi	88.46	Sangat Tinggi

2014	83.57	Sangat Tinggi	91.01	Sangat Tinggi	90.82	Sangat Tinggi	89.82	Sangat Tinggi
2015	76.09	Sangat Tinggi	77.18	Sangat Tinggi	82.09	Sangat Tinggi	84.72	Sangat Tinggi
2016	74.70	Sangat Tinggi	71.03	Sangat Tinggi	82.41	Sangat Tinggi	82.20	Sangat Tinggi
Rerata	80.57	Sangat Tinggi	83.08	Sangat Tinggi	88.05	Sangat Tinggi	87.65	Sangat Tinggi

Sumber: data diolah (2018)

Pada tabel 5 di atas menunjukkan ketergantungan keuangan daerah otonom secara keseluruhan berada pada kriteria sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Apabila hal ini terus berlanjut maka dapat dipastikan bahwa menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi daerah dan desentralisasi keuangan daerah bagi daerah otonom maupun pusat. Akibat lainnya adalah beban keuangan pusat yang semakin besar untuk pembiayaan daerah otonom. Menurut Djalil (2014)

besarnya derajat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat dalam jangka panjang akan mengakibatkan pemerintah pusat mengalami *financial distress* (tekanan berat keuangan) karena kesulitan menanggung beban keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan membagi PAD dengan transfer pusat ditambah provinsi. Perhitungan rasio ini dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Kab. Nias		Kab. Nias Selatan		Kab. Nias Barat		Kab. Nias Utara	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
2010	6.38	Sangat Baik	3.15	Sangat Baik	0.74	Sangat Baik	1.10	Sangat Baik
2011	4.92	Sangat Baik	4.92	Sangat Baik	0.99	Sangat Baik	2.05	Sangat Baik
2012	7.85	Sangat Baik	2.30	Sangat Baik	1.28	Sangat Baik	1.97	Sangat Baik
2013	10.69	Baik	1.52	Sangat Baik	2.26	Sangat Baik	2.21	Sangat Baik
2014	14.44	Baik	2.04	Sangat Baik	2.84	Sangat Baik	2.29	Sangat Baik
2015	11.43	Baik	1.88	Sangat Baik	3.21	Sangat Baik	2.90	Sangat Baik
2016	11.26	Baik	2.27	Sangat Baik	3.29	Sangat Baik	3.64	Sangat Baik
Rerata	9.57	Sangat Baik	2.58	Sangat Baik	2.09	Sangat Baik	2.31	Sangat Baik

Sumber: data diolah (2018)

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat ditunjukkan pada tabel 6 di atas keempat kabupaten di atas secara umum berada pada kriteria baik dan sangat baik yang artinya daerah tersebut secara keuangan daerah dapat mandiri. Akan tetapi bila dilihat dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat rendah. Hal ini menyebabkan setiap pembelanjaan yang dilakukan masih bergantung pada dana pusat maupun provinsi dalam bentuk dana perimbangan. Ketika

belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana perimbangan daripada PAD menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect* (efek kertas layang). Menurut Sukriy dan halim (2004:1140) *flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemda merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri.

Ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan daerah keempat kabupaten di atas dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7
Tests of Between-Subjects Effect

Variabel Independen	Variabel Dependen	Type III Sum of Squares	Mean Square	Sig
Desentralisasi Fiskal	Kabupaten Nias	39,670	9,918	0,000
	Kabupaten Nias Selatan	6,229	1,557	0,000
	Kabupaten Nias Barat	2,957	0,739	0,000
	Kabupaten Nias Utara	0,868	0,217	0,000
Ketergantungan Keuangan Daerah	Kabupaten Nias	121,588	30,397	0,000
	Kabupaten Nias Selatan	51,013	12,753	0,000
	Kabupaten Nias Barat	68,110	17,027	0,000
	Kabupaten Nias Utara	24,527	6,132	0,000
Kemandirian Keuangan Daerah	Kabupaten Nias	57,179	14,295	0,000
	Kabupaten Nias Selatan	7,082	1,770	0,000
	Kabupaten Nias Barat	3,185	,796	0,000
	Kabupaten Nias Utara	,913	,228	0,000

Sumber: Olan (2018)

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa variabel dependen terhadap variabel terdapat nilai signifikansi yang menunjukkan nilai $0,000 < 5\%$ yang artinya H_0 ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan kinerja keuangan antara Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara berdasarkan desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4, 5 dan 6. Hal perhitungan rata-rata rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa urutan pertama Kabupaten Nias (8,66) disusul Kabupaten Nias Selatan (2,42%), Kabupaten Nias Utara (2,25%) dan terakhir Kabupaten Nias Barat (2,00%). Rata-rata perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan ditempati

secara berturut-turut oleh Kabupaten Nias Barat (88,05%), Kabupaten Nias Utara (87,65%), Kabupaten Nias Selatan (83,08%) dan terakhir Kabupaten Nias hanya (80,57%). Kemandirian keuangan daerah posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias (9,57%) selanjutnya Kabupaten Nias Selatan (2,58), Kabupaten Nias Utara (2,31) dan Kabupaten Nias Barat (2,09%).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi sangat kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik.
2. Adanya perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan

daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

3. Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Rasio ketergantungan keuangan daerah ditempati secara berturut-turut oleh Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan terakhir Kabupaten Nias hanya. Kemandirian keuangan daerah posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias selanjutnya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Masyarakat harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai kemampuannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.
- Abdullah, Syukriy. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Blog: <http://syukriy.wordpress.com>. Diakses tanggal 18 Juni 2018.
- Ani, Ni Luh Nana Putri dan Dwiranda A.A.N.B. (2014) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi*: Universitas Udayana.
- Arifin, Johar. 2004. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Badan Pusat Statistik. (2005-2017). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Djalil, Rizal. 2014. Ketergantungan Pemda Atas Dana Perimbangan Sangat Tinggi. Berita Online: Antara New Jawa Timur. Diakses tanggal 12 Juli 2018.
- Hair, J. F. et al. 2010. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timue Periode 2001-2006. Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Lane, D.M. 2016. The Assumption of Sphericity in Repeated-Measures Design: What it means anda what to do when its is violated. *The Quantitative Methods for Psychology*, 12.
- Mahmudi (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001*. HIMMEP, Yogyakarta.
- Nazir, Mohamad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Sucipto, 2007. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi Sumatera Utara Medan.
- Sudijono, Anas. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.